



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445 / 187 / Ktps/BPT-PS/2022**

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER TAHUN 2022**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Tahun 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/145/ II/Pem-PM/Bappeda-2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:

- a. Dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu dilakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;

- b. Dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu dilakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- c. membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Sekretaris yakni Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. guna efektifitas dan efisiensi, maka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/145/ II/Pem-PM/Bappeda-2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2022;
- e. substansi dan target Rencana Pencapaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, diberlakukan secara seragam dalam pelaksanaannya untuk seluruh Perangkat Daerah;
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab untuk:
 - 1. memantau dan memastikan Perangkat Daerah yang terlibat sebagai pelaksana Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap data dukung masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09) dan Bulan Keduabelas (B12) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Pelaksana Pencapaian, untuk memastikan kesesuaian laporan dan data dukung yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden.

- g. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selaku pemegang *username* dan *password* pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden, bertanggung jawab untuk menyampaikan pelaporan pada masing-masing ukuran keberhasilan pada masa pelaporan B03 (Bulan Ketiga), B06 (Bulan Keenam), B09 (Bulan Kesembilan) dan B12 (Bulan Keduabelas) pada semua Rencana Pencapaian pada *website* : <https://serambi.ksp.go.id>, Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah akan melakukan verifikasi terhadap laporan data dukung yang disampaikan oleh Perangkat Daerah pada *website* : <https://serambi.ksp.go.id> untuk setiap periode B03 (Bulan Ketiga), B06 (Bulan Keenam), B09 (Bulan Kesembilan) dan B12 (Bulan Keduabelas);
- h. guna pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pencapaian PUG, maka secara berkala akan dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Tim Penggerak PPRG Kabupaten Pesisir Selatan pada periode sebelum dan setelah masa penyampaian dan verifikasi laporan;
- i. memastikan dilaksanakannya langkah-langkah pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui penggunaan atau pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih responsif Gender (PPRG);
- j. melampirkan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statemen* (GBS) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada kegiatan prioritas unit kerja masing-masing Pemerintah Daerah;
- k. kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat diajukan dengan memprioritaskan kegiatan antara lain yakni:
1. mengatasi kesenjangan Gender yang terjadi;
 2. penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's;
 3. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*);
 4. dalam rangka pencapaian SPM;
 5. mendukung indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD; dan

6. Inovasi Daerah.

1. implementasi *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statemen* (GBS) sebagaimana dimaksud pada huruf i, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan telah masuk pada Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 445 / 187 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 4 MARET 2022

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2022

RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2022

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah							
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya Kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh	B03 : Tersusunnya rancangan Kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)		B03 : Scan rancangan Kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Perda / Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
			stakeholder	seluruh stakeholder	B06: 1. Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) 2. Sosialisasi/Advokasi /Kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi <u>Dirubah menjadi :</u> Advokasi Peraturan/Kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi		B06: 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tanda tangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah, berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya) 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/Advokasi seperti surat atau kliping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi) <u>Dirubah menjadi :</u> Scan data dukung pelaksanaan/Advokasi seperti surat atau kliping koran/rekaman video/dokumentasi (bila

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Tersediannya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Pesisir	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG di tingkat Kabupaten Pesisir			dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.
					B09: Publikasi Kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.		B09: <i>Scan link</i> publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
					B12 : -		B12 : -
					B03 : 1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Ditetapkannya Rencana Pencapaian PUG yang		B03 : 1. <i>Scan</i> rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. <i>Scan</i> Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan,

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
			Selatan	Selatan	disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah		tanggal ditetapkan, tanda tangan Kepala Daerah dan Stempel)
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12 : -		B12 : -
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2. Orientasi tentang RKPD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD. 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.		B03 : 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD. 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD 4. Scan daftar data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B06: Rancangan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator Kinerja sebagai acuan dalam pembangunan		B06: 1. BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salahsatu dasar hukum (tetap) atau termuat di BAB I 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 5. Scan Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator Kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang responsif gender dalam Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
					<p>B09:</p> <p>Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yang memuat substansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program 		<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum atautermuat di BAB I 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator Kinerja sebagai acuan dalam

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Pembangunan yang Responsif Gender
					B12 : -		B12 : -

PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG

Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten Pesisir Selatan dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder di Kabupaten Pesisir	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten Pesisir Selatan	B03 : 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten Pesisir Selatan, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Draft Penyusunan	B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten Pesisir Selatan, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Draft penyusunan Keputusan Kepala Daerah
---	--------------------------------------	---	--	--	---	---

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha			Selatan		Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha, melampirkan surat usulan Draft ke Bagian Hukum.
					B06: Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B06: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha (SK sudah di tanda tangani oleh Kepala Daerah)
					B09: -		B09: -
					B12 : -		B12 : -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten Pesisir Selatan, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten Pesisir Selatan	B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan OPD Kabupaten Pesisir Selatan, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03: <i>Scan</i> Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan OPD Kabupaten Pesisir Selatan, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten		B03: <i>Scan</i> Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandatangani minimal oleh

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perlindungan Anak	dengan baik		Pesisir Selatan		Ketua Pokja PUG
					B06:		B06:
					-		-
					B09 :		B09 :
					-		-
					B12:		B12:
					-		-

SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan kepala instansi vertikal di Kabupaten Pesisir Selatan	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner spanduk/leaflet /brosur/media	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal,		B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
--	--------------------------------------	---	--	--	---	--	--

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
				promosi lainnya	dan Ormas)		
					B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya		B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya
					B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan		B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan
Stakeholder terkait khususnya OPD yang memiliki program dan kegiatan dengan sasaran kelompok	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya program dan kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan	Tersusunnya Program dan Kegiatan dengan sasaran kelompok rentan	B03: B06: -		B03: - B06: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
rentan dan perempuan khususnya			khususnya		B09: 1. Terinventarisir program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan		B09: 1. Scan daftar program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan dalam bentuk Renja OPD
					B12: -		B12: -

IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesenjangan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah

Pembentukan Tim Penggerak/ Driver PPRG Kabupaten Pesisir Selatan	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Terwujudnya Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten Pesisir Selatan	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten Pesisir Selatan 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pesisir Selatan 3. Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pesisir		03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten Pesisir Selatan 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pesisir Selatan (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten Pesisir
--	--------------------------------------	---	---	--	---	--	--

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>Selatan oleh Keputusan Kepala Daerah</p> <p>4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra)</p> <p>5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pesisir Selatan</p>		<p>Selatan</p> <p>4. Scan bukti pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi</p> <p>5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pesisir Selatan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi</p>
					B06:		B06:
					-		-
					B09:		B09:
					-		-
					B12:		B12:
					-		-
Publikasi Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website	<p>B03:</p> <p>1. Publikasi Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun</p>		<p>B03:</p> <p>1. Scan link Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun sebelumnya pada</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Tahun 2021		Perlindungan Anak	dan perempuan dalam dokumen data daerah	daerah	sebelumnya pada <i>website</i> Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah 3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan		<i>website</i> pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan
					B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan		B06: Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul
					B09: 1. Ditetapkannya Buku Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan		B09: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Buku Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan 3. B12: Dipublikasikannya Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan dalam website resmi Pemerintah Daerah		2. <i>Softcopy</i> Buku Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan(lengkap) 3. Dokumentasi Buku Profil Gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)
							B12: Scan link Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun berkenaan pada website Pemerintah Daerah disertai dengan <i>print screen</i> profil gender yang dipublikasikan
Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	BPKPAD	Tersedianya Pedoman Kebijakan Anggaran yang memuat Responsif Gender berupa Surat Edaran dalam penyusunan KUA PPAS 2023	Ditetapkannya dokumen berupa Surat Edaran.	B03 : -		B03 : -
					B06: -		B06: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09 : Ditetapkan Surat Edaran yang memuat Anggaran Responsif Gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023		B09 : Scan Surat Edaran yang memuat Anggaran Responsif Gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023
					B12: -		B12:
		BPKPAD	Terakomodirnya isu serta Kebijakan yang Responsif Gender dalam Dokumen KUA PPAS	Ditetapkannya dokumen KUA PPAS Tahun 2023 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03: -		B03: -
					B06: -		B06: -
					B09 : 1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS		B09 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perubahan Tahun 2022 a. Tercantumnya PUG sebagai salah satu dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 b. Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 2. Rancangan KUA PPAS Tahun 2023		Perubahan tahun 2022 2. Scan Bab I Pendahuluan pada Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2022 3. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 4. Scan surat penyampaian rancangan KUA PPAS ke DPRD
					B12: Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023, yang memuat Substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah satu dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS 2. Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023		B12 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA 2. Scan Bab I Pendahuluan pada Dokumen PPAS 3. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender	Pemerintah Kabupaten	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender	B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota		B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	Perlindungan Anak	pembangunan di daerah	Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten Pesisir Selatan website Pemerintah Daerah	<p>Focal Point OPD Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada kegiatan yang terkait dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> mengatasi ketimpangan gender yang terjadi penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's peningkatan pelayanan kepada masyarakat (service delivery) Dalam rangka pencapaian SPM Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD. Inovasi Daerah 		<p>Focal Point OPD Kabupaten Pesisir Selatan antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mengatasi ketimpangan gender yang terjadi Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan penugasan prioritas Nasional/global seperti pencapaian SDGs Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (service delivery) Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan Inovasi Daerah

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B06: 1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada website resmi pemerintah daerah 3. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning		B06: 1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG) 2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten Pesisir Selatan 3. Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah 4. Print screen menu tagging "kegiatan yang responsif gender" pada e-planning
					B09: 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah		B09: 1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD 2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan		oleh Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
					B12: 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Tersedianya menu <i>Tagging</i> /Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada <i>e-budgeting</i> 3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil <i>tagging</i> pada <i>e-budgeting</i> yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan		B12: 1. <i>Scan</i> Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. <i>Printscreen</i> menu <i>Tagging</i> /Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada <i>e-budgeting</i> 3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil <i>tagging</i> pada <i>e-budgeting</i> yang ditandatangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 4. <i>Scan</i> Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG		
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Inspektorat	Tersedianya hasil <i>review</i> terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Tersusunnya hasil <i>review</i> inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Pesisir Selatan	B03: 1. Penyusunan kegiatan <i>review</i> PPRG tahun 2022 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2022. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Januari – Maret 2022.		B03: 1. <i>Scan</i> Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022. 2. <i>Scan</i> hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Januari – Maret 2022.
			Tersedianya Pedoman <i>review</i> Terhadap PPRG di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Penyusunan pedoman <i>review</i> yang memuat PPRG	B03 : Terbitnya pedoman <i>Review</i> yang memuat PPRG di Kabupaten Pesisir Selatan		B03 : <i>Scan</i> Pedoman <i>Review</i> yang memuat PPRG di Kabupaten Pesisir Selatan
					B06: 1. Pelatihan/Bimtek		B06: 1. <i>Scan</i> bukti pelaksanaan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>untuk APIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah</p> <p>2. Pemeriksaan Implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode April - Juni 2021</p>		<p>Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain : undangan/Nota dinas, absensi, notulen dan dokumentasi</p> <p>2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode April - Juni 2021</p>
					<p>B09:</p> <p>1. Pembentukan Tim Review PPRG</p> <p>2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023</p> <p>3. Pemeriksaan Pmplementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Juli - September 2022</p>		<p>B09:</p> <p>1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>3. Scan hasil Pemeriksaan Implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Juli - September 2022</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
				1	B12: Pemeriksaan Implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Oktober – Desember 2022		B12: Scan Hasil Pemeriksaan Implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Oktober – Desember 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSNATIUL ANWAR